

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu isu sosial yang muncul akibat ketidakmerataan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yang ditandai oleh tingginya angka pengangguran dan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Hal ini menjadi tantangan signifikan bagi banyak negara di seluruh dunia untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi mereka agar tidak terjebak dalam kondisi yang semakin buruk seiring dengan perubahan zaman yang terus berlangsung (Elpiani et al., 2023). Proses meningkatkan kesejahteraan dihambat oleh masyarakat yang miskin karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan papan. Kemiskinan tidak hanya berarti kurangnya harta benda atau sumber daya. Masalah sebenarnya terletak pada kurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pengoptimalan dan pemanfaatan potensi sumber daya ditawarkan oleh beberapa komoditas (Matondang et al., 2024).

Bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah, komunitas atau individu dalam penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki kelayakan ekonomi yang rendah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bantuan sosial. Tujuannya untuk membantu tercapainya tujuan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan menganut asas keadilan, martabat, akal sehat, dan manfaat bagi masyarakat (Suprpto et al., 2024). Bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa barang, uang secara tunai dan sembako dan pangan lainnya, hal ini dapat memberikan dampak

yang baik. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperhatikan dan di evaluasi untuk mengetahui kelancarannya (Nugraha et al., 2022).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan bagian dari sistem informasi yang ditujukan untuk menghasilkan alternatif keputusan bagi pengambil keputusan dalam mencapai tujuan tertentu. Digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur serta situasi tidak terstruktur yang mana tidak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Fitri et al., 2022). Manfaat penggunaan SPK akan menjadi sebuah solusi dengan cepat dan hasilnya dapat diandalkan, dapat meyakinkan para pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambilnya, serta mendapatkan keuntungan yang kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dalam menghemat waktu, tenaga serta biaya (Satria, 2023). Ada tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu kemampuan memahami informasi, merancang suatu objek atau sistem, menentukan pilihan dari berbagai sudut pandang dan mengimplementasikannya. Pengambilan keputusan mendekati alternatif secara sistematis dan menentukan tindakan berdasarkan perhitungan yang tepat. Suatu alat komputer dengan kinerja dan kemampuan untuk menghasilkan solusi suatu masalah berupa keputusan terbaik bagi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan (Rizka et al., 2023).

SPK mulai dikembangkan pada tahun 1960-an, tetapi istilah sistem pendukung keputusan itu sendiri baru muncul pada tahun 1971, yang diciptakan oleh G. Anthony Gorry dan Micheal S.Scott Morton. Hal ini mereka lakukan dengan bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja guna mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan manajemen. *Decision Support System*

(DSS) menggabungkan data, model, dan pengetahuan untuk memberi pembuat keputusan informasi yang lebih akurat dan jelas, ini membantu untuk menyelesaikan masalah perusahaan atau organisasi (Angela et al., 2023).

Metode VIKOR (*Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje*) adalah metode *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) yang pertama kali dikembangkan dan diajukan oleh Opricovic & Tzeng pada tahun 1998. VIKOR secara harfiah mempunyai arti optimasi dari beberapa kriteria ke dalam peringkat kompromi. VIKOR digunakan untuk menentukan daftar solusi kompromi, solusi peringkat, serta tentang stabilitas bobot yang akan dijadikan dasar bagi stabilitas solusi kompromi yang diperoleh dari bobot awal (Ariansyah, 2024). Metode VIKOR diadopsi untuk mengukur solusi kompromi yang terjauh dari solusi ideal negatif (SIN) dan paling dekat dengan solusi ideal positif (SIP) dan memberi peringkat alternatif keputusan. Metode ini memberikan solusi alternatif paling efektif yang paling dekat dengan yang ideal. Kelebihan metode VIKOR dalam kompromi alternatif yang ada, serta dapat menyelesaikan pengambilan keputusan bersifat diskrit pada kriteria yang bertentangan dan *non commensurable*, yaitu perbedaan unit antar kriteria (Guswandi et al., 2022)

Metode VIKOR memiliki tujuan untuk mendapatkan perangkaian alternatif untuk mendekati solusi terbaik dengan memberi solusi kompromi dengan pembobotan kriteria menggunakan matriks (Hudaiby et al., 2022). Metode VIKOR berfokus pada pemeringkatan setiap alternatif. Metode VIKOR juga membantu mengatasi masalah multi-kriteria dalam sistem yang kompleks. Selain itu metode VIKOR memiliki kelebihan dari kompromi alternatif yang memungkinkan

memberikan rekomendasi penentuan penerima bantuan sosial dengan hasil yang tepat (Sukma et al., 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vicky Rahmawan dkk pada Januari 2024. Dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Penerima Program Bantuan Sosial Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Penelitian ini membahas dalam menentukan calon penerima bantuan sosial di Kelurahan Sukalaksana distribusi bantuan kepada masyarakat masih belum tepat sasaran dan banyak warga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan sosial karena pemberian bantuan program yang belum efektif. Dengan banyaknya warga yang memiliki kriteria dari berbagai aspek kehidupan yang berbeda-beda akan menyulitkan petugas RT/RW dalam menentukan penilaian siapa saja warga yang seharusnya lebih layak mendapatkan bantuan sosial. Dan juga masih terdapat ketidakvalidan data penerima bantuan sosial yang sudah meninggal dan pindah domisili tetapi masih tercatat dalam menerima bantuan sosial. Oleh karena itu Vicky dkk merancang sebuah Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Penerima Program Bantuan Sosial berdasarkan metode yang digunakan. Yaitu memanfaatkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Salah satu metode dimana dalam metode AHP ini terdapat beberapa proses perhitungan yang digunakan sebagai acuan data dan perbandingan berpasangan untuk menjelaskan faktor evaluasi dan faktor bobot dalam kondisi multi faktor dalam pemilihan penerima bantuan sosial. Sehingga akan sangat membantu dan memudahkan petugas RT/RW dalam melakukan penilaian warga yang layak menerima bantuan sosial (Rahmawan et al., 2024).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Nurhidayat dkk pada tahun 2022. Dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Metode SMART Dalam Penentuan Pemberian Bantuan Sosial Berdasarkan DTKS Di Desa Bebengan. Penelitian ini membahas tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih rendah yang mengakibatkan angka kemiskinan menjadi tinggi. Dalam upaya menekan kemiskinan di Indonesia pemerintah memberikan bantuan sosial untuk memberikan modal atau mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Adanya banyak bantuan mengakibatkan keluranya bantuan tidak tepat sasaran. Dalam upaya tersebut penelitian ini membangun sistem pendukung keputusan dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat (DTKS) sebagai keriterianya. Dalam data DTKS hanya memuat data BPS tahun 2019 dan belum ada pembaruan secara berkala. Oleh karena itu diperlukan pembaruan DTKS untuk memverifikasi masyarakat miskin terdampak C 19. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan perangkat desa Bebengan dalam memutuskan pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Metode yang dapat digunakan pada sistem ini adalah metode SMART (*Simple Multi Attribute Rating Technique*). Metode SMART merupakan teknik pengambilan multikriteria yang cepat dan mudah untuk digunakan. Untuk menentukan calon penerima bantuan sosial berdasarkan 10 kriteria yaitu : kondisi rumah, sumber air, penghasilan, tegangan listrik, Pendidikan, pekerjaan, sumber air, bahan bakar memasak, umur, Tanggungan. Berdasarkan pada 10 kriteria tersebut disusunlah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode smart, Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi dan keputusan. Dari kriteria yang diberikan ibu Sulastri

mendapatkan peringkat teratas sebagai alternatif teratas dengan nilai 93 (Nurhidayat et al., 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Nopriani Sianipar dkk tahun 2023. Dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Titi Kuning Dengan Metode VIKOR. Pada penelitian ini membahas tentang dalam upaya meningkatkan efektivitas penganggulan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) sudah diterapkan di berbagai daerah Indonesian, dan kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan PKH. Kendala yang sering ditemukan dalam proses penentuan penerima bantuan PKH yaitu adanya penerima bantuan sosial PKH yang tidak tepat sasaran. Selain itu, dikarenakan banyaknya jumlah keluarga membuat pemeringkatan penerima bantuan PKH akan memerlukan waktu yang lama. Dengan begitu dibutuhkan suatu solusi untuk membantu permasalahan tersebut yaitu dengan sistem pendukung keputusan yang menerapkan metode VIKOR sebagai penentuan prioritas calon penerima bantuan sosial PKH di Kelurahan Titi Kuning. Sistem pendukung keputusan memiliki tujuan dalam memberikan informasi kepada para pengambil keputusan sehingga pengambil keputusan dapat memberikan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Merancang suatu sistem pendukung keputusan penentuan prioritas calon penerima bantuan sosial PKH dengan metode VIKOR di Kelurahan Titi Kuning, sehingga penerima bantuan PKH tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat menunjang kinerja dari Pemerintah

Desa hingga ke Dinas Sosial maupun hingga Kementerian Sosial (Sianipar et al., 2023).

Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kab. Agam, merupakan salah satu nagari yang menerima bantuan sosial. Namun, proses penentuan penerima masih dilakukan secara manual dan sering tidak tepat sasaran, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Data yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik, dan kriteria penilaian kurang jelas serta tidak terstruktur. Hal ini mendorong perlunya teknologi untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data akurat.

Dengan penerapan metode VIKOR dalam sistem pendukung keputusan di Kantor Wali Nagari Sungai Pua, proses seleksi penerima bantuan sosial diharapkan dapat dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan adil. Sistem ini akan membantu pengambil keputusan menganalisis data calon penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat kemiskinan, jumlah anggota keluarga, serta kondisi sosial-ekonomi, sehingga bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis ingin mengangkat judul penelitian yaitu **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL MENGGUNAKAN METODE *VISEKRITERIJUMSKA OPTIMIZACIJA I KOMPROMISNO RESENJE* (VIKOR) PADA KANTOR WALI NAGARI SUNGAI PUA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penelitian ini dapat membantu pihak Kantor Wali Nagari Sungai Pua dalam menentukan penerima bantuan sosial sehingga tepat sasaran?
2. Bagaimana penerapan metode *Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje* dapat membantu pihak Kantor Wali Nagari Sungai Pua dalam mengoptimalkan proses penentuan penerima bantuan sosial?
3. Bagaimana hasil penilaian penerima bantuan sosial pada Kantor Wali Nagari Sungai Pua dapat diperoleh dengan mudah dan cepat?.

1.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara dimana nantinya akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat ditemukan beberapa hipotesa sebagai berikut :

1. Diharapkan penerapan metode *Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje* dapat membantu pihak Kantor Wali Nagari Sungai Pua dalam menentukan penerima bantuan sosial sehingga tepat sasaran.
2. Diharapkan metode *Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje* yang diimplementasikan diharapkan dapat mengoptimalkan proses penentuan penerima bantuan sosial di Kantor Wali Nagari Sungai Pua.
3. Diharapkan dengan penerapan *website* menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dapat mempermudah pihak Kantor Wali Nagari Sungai Pua dalam penentuan penerima bantuan sosial.

1.4 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai penulis maka penulis membatasi pembahasan masalah, yaitu :

1. Penelitian penentuan penerima bantuan sosial dilakukan di Kantor Wali Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam menggunakan metode *Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje*.
2. Sistem yang dikembangkan hanya untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan bantuan sosial.
3. Sistem yang akan dikembangkan nantinya berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah :

1. Menerapkan metode *Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje* untuk dapat membantu pihak Kantor Wali Nagari Sungai Pua dalam menentukan penerima bantuan sosial sehingga tepat sasaran.
2. Menerapkan metode *Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje* dapat membantu pihak Kantor Wali Nagari Sungai Pua dalam mengoptimalisasi proses penentuan penerima bantuan sosial.
3. Menerapkan *website* dengan metode *Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje* untuk memudahkan penentuan penerima bantuan sosial.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan pengetahuan kepada pihak Kantor Wali Nagari Sungai Pua tentang penentuan penerima bantuan sosial menggunakan metode *Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje* agar dapat menjadi bahan acuan untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
2. Membantu pihak Kantor Wali Nagari dalam penentuan penerima bantuan sosial yang akan datang menggunakan metode *Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje* agar dapat meminimalisir terjadinya pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang instansi atau perusahaan. Gambaran umum tersebut diantaranya tentang informasi sekilas Nagari Sungai Pua, Struktur Pemerintahan Nagari Sungai Pua, tugas dan fungsi, serta visi dan misi dari Kantor Wali Nagari Sungai Pua.

1.7.1 Sekilas Tentang Nagari Sungai Pua

Sungai Pua merupakan salah satu nagari yang sekaligus menjadi nama sebuah kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pua, di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di bagian barat Gunung Marapi, atau sekitar 10 km dari Kota Bukittinggi ke arah Gunung Marapi. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Kubang Putih, sebelah Selatan dengan Nagari Sariak, dan sebelah barat dengan Nagari Banuhampu.

Sungai Pua ini terkenal sebagai daerah penghasil peralatan dari logam, terutama dari besi dan kuningan. Bahkan, dalam sejalar perjuangan melawan Belanda, daerah ini pemasok peluru. Selain sebagai pengrajin logam, mata pencarian utama masyarakat Sungai Pua adalah pertanian dan konveksi. Sebagai daerah yang sering mendapatkan muntahan abu dari Gunung Merapi, daerah ini sangat subur. Sungai Pua terdiri dari 5 jorong yaitu, Jorong Galuang, Jorong Kapalo Koto, Jorong V Kampuang, Jorong V Suku, dan Jorong Tangah Koto.



Gambar 1.1 Kantor Wali Nagari Sungai Pua

1.7.2 Visi & Misi Nagari Sungai Pua

1. Visi Nagari Sungai Pua :

“Terwujudnya Nagari Sungai Pua Sebagai Nagari yang Mandiri, Maju dan Beriman (Bersih, Indah, dan Nyaman) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berlandaskan ABS-SBK”.

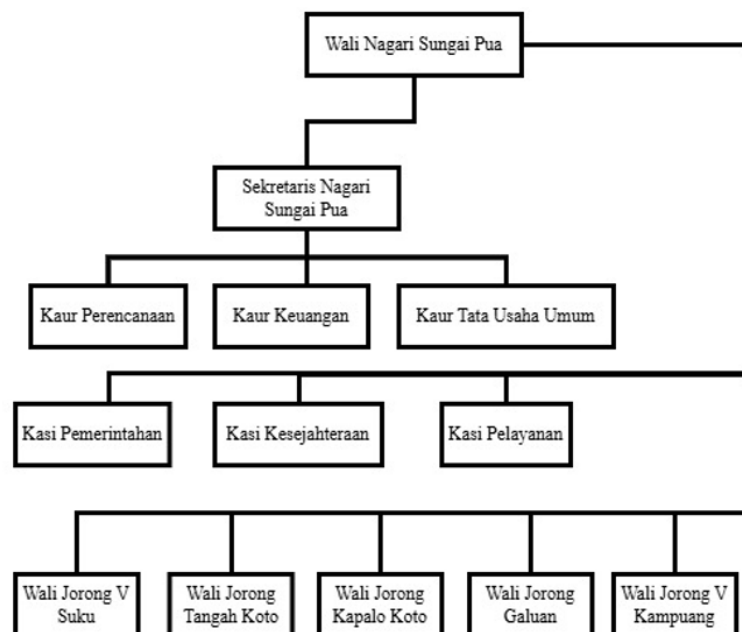
2. Misi Nagari Sungai Pua :

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan transparan.

- 2) Pembangunan yang berkelanjutan serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
- 3) Meningkatkan kehidupan beragama dan norma adat istiadat dalam kerangka adat salingka nagari.
- 4) Menggerakkan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan Lembaga ekonomi nagari.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berkarakter.
- 6) Peningkatan peran masyarakat untuk pembangunan nagari.

1.7.3 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Sungai Pua

Untuk memahami lebih jelas mengenai tata kelola dan pengelolaan pemerintahan di Nagari Sungai Pua, penting untuk melihat struktur organisasi yang ada. Struktur ini menggambarkan hubungan hiararki dan interaksi antar elemen yang terlibat dalam proses pemerintahan. Berikut ini gambar struktur Pemerintahan Nagari Sungai Pua:



Gambar 1.2 Struktur Pemerintahan Nagari Sungai Pua

1.7.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintahan Nagari

Berikut adalah uraian pekerjaan pada Kantor Wali Nagari Sungai Pua:

1. Wali Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembanguna nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

2. Sekretaris Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menyusun produk hukum nagari
- 2) Mengundangan produk hukum nagari
- 3) Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari
- 4) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat nagari
- 5) Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan
- 6) Memberikan pelayanan administrasi
- 7) Melakukan penatausahaan keuangan nagari
- 8) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- 9) Menginventarisir dan mengelola aset nagari
- 10) Mengelola administrasi kepegawaian
- 11) Mengumumkan informasi pemerintahan nagari kepada masyarakat
- 12) Menfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah nagari
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan nagari dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kampung atau nagari
- 3) Mengelola arsip perencanaan dan pembangunan
- 4) Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari di bidang pemerintahan
- 5) Membukukan dan pemberian nomor, tahun dan tanggal pengundangan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari dalam Lembaran Daerah
- 6) Membantu Wali Nagari dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil-hasil pembangunan nagari
- 7) Membantu Wali Nagari dalam pengembangan perekonomian masyarakat nagari
- 8) Membantu Wali Nagari dalam upaya pelestarian lingkungan nagari
- 9) Meyiapkan bahan penyusunan LPPN dan LKPJ Wali Nagari
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan RAPBDesa
- 11) Menatausahakan keuangan nagari
- 12) Membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang ada di Nagari bersama dengan instansi terkait

- 13) Mengkoordinir pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat laporannya kepada Camat
 - 14) Melaksanakan dan mengkoordinir pemungutan Pendapatan Asli Nagari (PAN) serta melaporkan hasilnya kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari
4. Kepala Urusan Tata Usaha Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Mencatat dan menginventarisir aset nagari
 - 2) Memelihara aset nagari
 - 3) Mengelola administrasi kepegawaian
 - 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah nagari
 - 5) Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar
 - 6) Melakukan penataan arsip nagari
 - 7) Membuat daftar hadir perangkat pemerintah nagari dan staf (lingkup sekretariat nagari) serta daftar hadir rapat/musyawarah nagari
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
5. Kepala Seksi Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Merumuskan dan menindaklanjuti hasil musyawarah pembanguna nagari yang berhubungan dengan tugas-tugas di bidang pemerintahan
 - 2) Menyusun buku profil nagari dan Indeks Desa Membangun serta membuat papan monografi nagari serta mengisi papan data-data

pokok nagari seperti peta nagari, data penduduk, susunan kepengurusan Bamus Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan

- 3) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintah seperti rekomendasi KTP, Kartu Keluarga dan lain sebagainya dalam bidang pemerintahan
 - 4) Membuat konsep surat, mengetik dan memaraf segala bentuk surat (tata naskah dinas) yang berkaitan dengan bidang tugas
 - 5) Melakukan penatausahaan segala surat menyurat dengan baik dan benar di bidang pemerintahan
 - 6) Membuat surat pengumuman, edara, himbauan, penggilan, peringatan, teguran dan sejenisnya kepada pribadi/masyarakat, organisasi dan badan usaha tentang pelaksanaan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan di tingkat nagari maupun peraturan perundang-undangan di tingkat lebih tinggi
 - 7) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari
 - 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari di bidang pembangunan

- 2) Mengkooordinir perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembanguna nagari bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) dan Lembaga-lembaga lainnya
 - 3) Mambantu Wali Nagari dalam berkoordinasi dengan unit kerja pemerintah dalam pembangunan nagari
 - 4) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksakan dalam APB Nagari
 - 5) Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di nagari
 - 6) Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan di bidang kesehatan dan keluarga berencana
 - 7) Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan
 - 8) Mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata di nagari
 - 9) Meyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
7. Wali Jorong mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) Membantu pelaksanaan pemerintah nagari di wilayah kerjanya
 - 2) Membantu pelaksanaan pembangunan nagari di wilayah kerjanya
 - 3) Melakukan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan di wilayah kerjanya

- 4) Mengadakan musyawarah pembangunan kampung guna disampaikan dalam musyawarah pembangunan nagari
- 5) Melaksanakan gotong royong secara berkala dan berkelanjutan
- 6) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan antara masyarakat dalam kampung
- 7) Membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan nagari di wilayah kerjanya
- 8) Membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari di wilayah kerjanya
- 9) Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan